



Renja Perubahan 2024



**Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta**



081-993-040-040



bkad.purwakartakab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III.....	52
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.3 Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).....	57
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasanya Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Asset Daerah, Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagai pedoman operasional kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dengan harapan implementasi perencanaan kerja dapat mencapai target pembangunan yang optimal.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM
NIP. 19731102 199901 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program BKAD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan programkegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi BKAD dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Rencana Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Rencana Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024- 2026;
2. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;

4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH S/D TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2024 ini menyajikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah triwulan II dan capaian renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Triwulan II dan Pencapaian Renstra
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Perangkat Daerah/Bidang/Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sesuai RPJMD dan DPA)	APBD Parsial II Tahun 2024			Realisasi Triwulan II Tahun 2024			Sisa		Catatan/ Permasalah an
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11	12
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
5.02	Keuangan				481.132.722.341			179.531.589.791	301.562.653.160	37,31	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				94.236.919.785			20.393.769.746	73.882.207.149	21,64	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah		A			A				
5.02.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.342.100			19.045.000	73.297.100	20,62	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta kab	2 Dokumen	30.097.300	Purwakarta kab		-	30.097.300	-	-
5.02.01.2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta kab	1 Dokumen	9.984.700	Purwakarta kab		-	9.984.700	-	-
5.02.01.2,01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta kab	1 Dokumen	9.955.100	Purwakarta kab		-	9.955.100	-	-
5.02.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta kab	2 Dokumen	20.142.000	Purwakarta kab		-	10.976.500	9.165.500	54,50
5.02.01.2,01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta kab	5 Dokumen	22.163.000	Purwakarta kab		-	8.068.500	14.094.500	36,41
5.02.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				87.344.547.733				18.499.072.286	68.845.475.447	21,18
5.02.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta kab	83 Orang /Bulan	87.309.587.533	Purwakarta kab		-	18.499.072.286	68.810.515.247	21,19

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2,02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Purwakarta kab	12 Dokumen	9.960.200	Purwakarta kab			9.960.200		
5.02.01.2,02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta kab	2 Laporan	15.000.000	Purwakarta kab			15.000.000		
5.02.01.2,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Purwakarta kab	18 Laporan	10.000.000	Purwakarta kab			10.000.000		
5.02.01.2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		6 DOKUMEN	20.000.000				4.600.000	15.400.000	23,00
5.02.01.2,03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta kab	2 Dokumen	10.000.000	Purwakarta kab			1.100.000	8.900.000	11,00
5.02.01.2,03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Purwakarta kab	4 Laporan	10.000.000	Purwakarta kab			3.500.000	6.500.000	35,00

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Milik Daerah pada SKPD									
5.02.01.2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun		4 Dokumen	751.500.000	0	0	-	751.500.000	-	-
5.02.01.2,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Purwakarta kab	2 Paket	327.500.000	Purwakarta kab			327.500.000		
5.02.01.2,05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta kab	3 Orang	50.000.000	Purwakarta kab			50.000.000		
5.02.01.2,05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purwakarta kab	150 Orang	198.000.000	Purwakarta kab			198.000.000		
5.02.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Purwakarta kab	100 Orang	176.000.000	Purwakarta kab			176.000.000		
5.02.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah		25 PAKET	1.470.932.992			779.618.814	698.945.088	53,00	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta kab	2 Paket	50.000.000	Purwakarta kab		49.914.000	86.000	99,83	
5.02.01.2,06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta kab	3 Paket	60.000.000	Purwakarta kab		59.678.500	321.500	99,46	
5.02.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta kab	5 Paket	500.587.992	Purwakarta kab		201.163.200	299.424.792	40,19	
5.02.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Purwakarta kab	10 Paket	449.820.000	Purwakarta kab		413.070.000	36.750.000	91,83	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Purwakarta kab	3 Dokumen	10.000.000			1.075.000	8.925.000	10,75	
5.02.01.2,06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta kab	12 Laporan	50.000.000	Purwakarta kab		2.700.000	47.300.000	5,40	
5.02.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta kab	12 Laporan	210.000.000	Purwakarta kab		52.018.114	164.537.796	24,77	
5.02.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta kab	2 Dokumen	66.525.000	Purwakarta kab		-	66.525.000	-	
5.02.01.2,06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Purwakarta kab	12 Dokumen	74.000.000	Purwakarta kab		-	74.000.000	-	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Berbasis Elektronik pada SKPD									
5.02.01.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		83 Unit	758.231.000			-	758.231.000	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Purwakarta kab	2 Unit		Purwakarta kab		-		-	
5.02.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta kab	40 Unit	199.532.000	Purwakarta kab		-	199.532.000		
5.02.01.2,07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Purwakarta kab	40 Unit	558.699.000	Purwakarta kab		-	558.699.000	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Purwakarta kab	1 Unit		Purwakarta kab		-		-	
5.02.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 LAPORAN	2.451.365.960			968.663.266	1.492.601.194	39,52	
5.02.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta kab	12 Laporan	5.000.000	Purwakarta kab		5.000.000	-	-	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta kab	12 Laporan	299.400.000	Purwakarta kab		129.289.160	179.509.340	43,18	
5.02.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta kab	12 Laporan	2.146.965.960	Purwakarta kab		834.374.106	1.313.091.854	38,86	
5.02.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara		86 Umit	1.348.000.000			122.770.380	1.241.757.320	9,11	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta kab	5 Unit	96.000.000	Purwakarta kab		34.717.650	70.368.050	36,16	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta kab	30 unit	152.000.000	Purwakarta kab		82.127.730	74.389.270	54,03	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Purwakarta kab	45 Unit	100.000.000	Purwakarta kab		5.925.000	97.000.000	5,93	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta kab	2 Unit	400.000.000	Purwakarta kab		-	400.000.000	-	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta kab	2 Unit	400.000.000	Purwakarta kab			400.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta kab	2 Unit	200.000.000	Purwakarta kab			200.000.000		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				384.869.795.556			158.846.519.695	226.036.814.361		
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		15 Persen			15 Perse n				
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		85 Persen			85 Perse n				
		Opini Laporan Keuangan		WTP			WTP				
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		75,54 Persen			75,54 Persen				
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		2,13 Persen			2,13 Perse n				

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Persentase SILPA terhadap APBD		1,74 Persen			1,74 Persen				
		Persentase belanja pendidikan (20%)		32 Persen			32 Persen				
		Persentase belanja kesehatan (10%)		21 Persen			21 Persen				
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		1,80 Persen			1,80 Persen				
		Penetapan APBD		Tepat Waktu			Tepat Waktu				
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran		6 Indeks / Skor			6 Indeks / Skor				
		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD		20 Indeks / Skor			20 Indeks / Skor				
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		8 Indeks / Skor			8 Indeks / Skor				
		Penyerapan Anggaran		8 Indeks / Skor			8 Indeks / Skor				
		Kondisi Keuangan Daerah		4 Indeks / Skor			4 Indeks / Skor				
5.02.02.2,01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan		23 Dokumen	3.651.355.000			1.047.169.195	2.616.400.305	28,68	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Rencana Anggaran Daerah									
5.02.02.2,01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Purwakarta kab	4 Dokumen	184.159.000	Purwakarta kab			184.159.000	-	
5.02.02.2,01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Purwakarta kab	4 Dokumen	198.105.000	Purwakarta kab			198.105.000	-	
5.02.02.2,01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Purwakarta kab	2 Dokumen	459.750.000	Purwakarta kab			459.750.000	-	
5.02.02.2,01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Purwakarta kab	1 Dokumen	458.400.000	Purwakarta kab		254.278.000	206.100.000	55,47	
5.02.02.2,01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Purwakarta kab	2 Dokumen	188.092.000	Purwakarta kab		53.858.000	134.234.000	28,63	
5.02.02.2,01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Purwakarta kab	1 Dokumen	229.990.000	Purwakarta kab		50.855.000	182.021.000	22,11	
5.02.02.2,01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Purwakarta kab	4 Dokumen	751.810.000	Purwakarta kab		565.164.600	186.645.400	75,17	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Purwakarta kab	4 Dokumen	921.049.000	Purwakarta kab		77.492.100	843.556.900	8,41	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Purwakarta kab	1 Dokumen	260.000.000	Purwakarta kab		45.521.495	221.829.005	17,51	
5.02.02.2,02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		52 Dokumen	938.725.000			228.680.000	709.545.000	24,36	
5.02.02.2,02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Purwakarta kab	14 Dokumen	124.986.000	Purwakarta kab		15.766.000	109.220.000	12,61	
5.02.02.2,02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Purwakarta kab	3 Dokumen	100.000.000	Purwakarta kab		29.556.000	70.444.000	29,56	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Purwakarta kab	20 Dokumen	124.945.000	Purwakarta kab		14.545.000	110.400.000	11,64	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Purwakarta kab	2 Laporan	49.992.000	Purwakarta kab		8.966.000	41.026.000	17,93	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Purwakarta kab	12 Dokumen	125.000.000	Purwakarta kab		23.140.000	101.860.000	18,51	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	Purwakarta kab	1 Dokumen	131.189.000	Purwakarta kab		2.694.000	128.495.000	2,05	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	100 Orang	282.613.000	Purwakarta kab		134.013.000	148.100.000	47,42	
5.02.02.2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		4 Dokumen	782.500.000			156.535.300	625.964.700	20,00	
5.02.02.2,03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Purwakarta kab	1 Dokumen	103.780.000	Purwakarta kab		17.381.000	86.399.000	16,75	
5.02.02.2,03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	2 Dokumen	632.670.000	Purwakarta kab		139.154.300	493.515.700	21,99	
5.02.02.2,03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Purwakarta kab	1 Dokumen	46.050.000	Purwakarta kab		-	46.050.000	-	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
5.02.02.2,04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun		4 Dokumen	378.994.537.556			157.313.636.200	221.680.901.356	41,51	
5.02.02.2,04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Purwakarta kab	204 Laporan	303.918.370.000	Purwakarta kab		157.302.476.200	146.615.893.800	51,76	
5.02.02.2,04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Purwakarta kab	12 Laporan	30.148.344.998	Purwakarta kab		11.160.000	30.137.184.998	0,04	
5.02.02.2,04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	183 Laporan	44.927.822.558	Purwakarta kab			44.927.822.558		
5.02.02.2,05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah		2 Dokumen	502.678.000			100.499.000	404.003.000	19,99	
5.02.02.2,05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Purwakarta kab	1 Dokumen	292.398.000	Purwakarta kab		100.499.000	193.723.000	34,37	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
5.02.02.2,05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	115 Orang	210.280.000	Purwakarta kab	-	210.280.000	-	-	-
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.026.007.000			291.300.350	1.734.706.650	14,38	
		Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)		1 Dokumen			1 Dokumen				
		Percentase BMD yang dimanfaatkan optimal		100 persen			100 persen				

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat		25 persen			25 persen				
		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		70 persen			70 persen				
		Persentase pengolah BMD yang dibina		100 persen			100 persen				
		Persentase penyusutan/ penghapusan BMD		100 persen			100 persen				
		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif		3 Indeks			3 Indeks				
		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan		3 Indeks			3 Indeks				
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif		3 Indeks			3 Indeks				
		Administrasi BMD yang Andal		3 Indeks			3 Indeks				
5.02.03.2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		19 Dokumen	2.026.007.000		19 Dokumen	291.300.350	1.734.706.650	14,38	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 Orang			100 Orang				

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Pemerintah Kabupaten/Kota									
5.02.03.2,01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Purwakarta kab	1 Dokumen	200.000.000	Purwakarta kab		169.140.250	30.859.750	84,57	
5.02.03.2,01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	2 Dokumen		Purwakarta kab					
5.02.03.2,01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	2 Dokumen	44.500.000	Purwakarta kab		10.077.100	34.422.900	22,65	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	1 Laporan	172.000.000	Purwakarta kab		1.387.100	170.612.900	0,81	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	1 Laporan	245.226.000	Purwakarta kab		34.695.000	210.531.000	14,15	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	1 Laporan	814.632.000	Purwakarta kab		25.474.000	789.158.000	3,13	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	5 Dokumen	188.000.000	Purwakarta kab		5.365.000	182.635.000	2,85	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	4 Laporan	64.962.000	Purwakarta kab		21.707.000	43.255.000	33,41	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Purwakarta kab	2 Laporan	171.687.000	Purwakarta kab		23.454.900	148.232.100	13,66	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	100 Orang	125.000.000	Purwakarta kab		125.000.000			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, terdapat 2 sasaran strategis pertama “Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan yang kedua adalah “Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah” yang diukur melalui 4 (Empat) indikator sasaran.

Tabel 2. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 Semester I

No	Indikator Sasaran	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra	Perkiraan Realisasi Capaian	Rasio Capaian
					2024	2024	2024
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah				A	A	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				Baik		
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				Baik		
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah				Baik		

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
 - a. Proses integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan sehingga proses penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban APBD masih terdapat banyak permasalahan sehingga masih menggunakan aplikasi yang lama (SIMDA).
 - b. Masih perlu dilakukan penyempurnaan prosedur operasi baku (Standard Operating Procedure). Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan perlu disempurnakan seiring dengan terbitnya peraturan baru. SOP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan BKAD.
 - c. Belum optimalnya penyajian data dan informasi. Penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi. Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam penyajian sistem informasi keuangan daerah.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
 - a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan

mobilitas personil sangat tinggi. Sarana dan Prasarana dirasa kurang memadai.

- b. Belum optimalnya Inventarisasi aset daerah. Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap PD. Sehingga di setiap PD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak cara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
 - c. Pensertifikatan aset tetap tanah masih belum optimal.
- 3) Belum optimalnya penataan arsip/dokumen. Kurang representatifnya tempat penyimpanan arsip/dokumen menjadikan kurang cepatnya memperoleh arsip/dokumen yang dibutuhkan;
 - 4) Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih terbatas. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan kompetensi aparatur yang mengerti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual utamanya bagi pejabat penatausahaan keuangan maupun barang di setiap PD se Kabupaten Purwakarta;
 - 5) Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Masih kurangnya pengawasan melekat dari atasan ke bawah secara periodik. Masih adanya keterlambatan penyusunan SPJ SKPD maksimal 10 hari pada bulan berikutnya. Namun untuk penyusunan Buku Kas Umum dapat dilaksanakan tepat waktu;
 - 6) Masih kurang tertibnya pelaporan realisasi keuangan dan laporan pajak pusat/daerah dari SKPD.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan di atas, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
- 3) Optimalisasi fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan efisiensi dan efektifitas sarana prasarana kerja;
- 5) Peningkatan manajemen aset daerah, sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- 6) Penyempurnaan sistem aplikasi dan database pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk penguatan jaringan internetnya;
- 7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informatika;
- 8) Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Perubahan Rancangan RKPD tahun 2024 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Badan keuangan dan Aset Daerah harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Badan keuangan dan Aset Daerah yang tercantum di dalam Perubahan RKPD 2024;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, ada perbedaan program, namun terdapat beberapa kegiatan dan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah karena hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024.

Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3 Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.3
Matrix Perubahan RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Murni 2024					Rancangan RKPD Perubahan 2024					KET
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				66.381.368.242	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.342.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	10 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.097.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.984.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.955.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	20.142.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	22.163.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				87.344.547.733	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang /Bulan	87.309.587.533	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang /Bulan		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.960.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6 DOKUME N				Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6 DOKUMEN		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				751.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	327.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Peserta yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	198.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan yang disosialisasikan	150 Orang		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	176.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.470.932.992	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	25 Paket				Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	25 Paket		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penyediaan Peralatan RumahTangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		
Penyediaan Bahan LogistikKantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.587.992	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	449.820.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	210.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	66.525.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	74.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				758.231.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah					
		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	83 Unit				Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		
Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	199.532.000	Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	558.699.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.451.365.960						
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 LAPORAN				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 LAPORAN		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	299.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.146.965.960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.348.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	86 Umit				Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	86 Umit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	96.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	152.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15 Persen				Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15 Persen		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	85 Persen				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	85 Persen		
		Opini Laporan Keuangan	WTP				Opini Laporan Keuangan	WTP		
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	75,54 Persen				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	75,54 Persen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		APBD					APBD			
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,13 Persen				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,13 Persen		
		Persentase SILPA terhadap APBD	1,74 Persen				Persentase SILPA terhadap APBD	1,74 Persen		
		Persentase belanja pendidikan (20%)	32 Persen				Persentase belanja pendidikan (20%)	32 Persen		
		Persentase belanja kesehatan (10%)	21 Persen				Persentase belanja kesehatan (10%)	21 Persen		
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1,80 Persen				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1,80 Persen		
		Penetapan APBD	Tepat Waktu				Penetapan APBD	Tepat Waktu		
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran	6 Indeks / Skor				Kesesuaian Dokumen Penganggaran	6 Indeks / Skor		
		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	20 Indeks / Skor				Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	20 Indeks / Skor		
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8 Indeks / Skor				Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8 Indeks / Skor		
		Penyerapan Anggaran	8 Indeks / Skor				Penyerapan Anggaran	8 Indeks / Skor		
		Kondisi Keuangan Daerah	4 Indeks / Skor				Kondisi Keuangan Daerah	4 Indeks / Skor		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.651.355.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	23 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	23 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	184.159.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	198.105.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	459.750.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	458.400.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	188.092.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	229.990.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen	751.810.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	4 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Daerah tentang Penjabaran APBD		Penjabaran APBD			Daerah tentang Penjabaran APBD		Daerah tentang Penjabaran APBD			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	921.049.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen		
Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	260.000.000	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	52 Dokumen	938.725.000			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	52 Dokumen		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	14 Dokumen	124.986.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	14 Dokumen		
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	100.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen		
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	20 Dokumen	124.945.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	20 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	49.992.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	125.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Instansi Terkait					SP2D dengan Instansi Terkait			
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	131.189.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	282.613.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				782.500.000						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen		
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dokumen	103.780.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	632.670.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	46.050.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				378.994.537.556	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun	4 Dokumen		
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran	204 Laporan	303.918.370.00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran	204 Laporan		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Bantuan Keuangan					Bantuan Keuangan			
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	30.148.344.99 8	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	183 Laporan	44.927.822.55 8	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	183 Laporan		
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				502.678.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	2 Dokumen		
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	292.398.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115 Orang	210.280.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115 Orang		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.026.007.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
		Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	1 Dokumen				Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	1 Dokumen		
		Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	100 persen				Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	100 persen		
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	25 persen				Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	25 persen		
		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	70 persen				Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	70 persen		
		Persentase pengolah BMD yang dibina	100 persen				Persentase pengolah BMD yang dibina	100 persen		
		Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	100 persen				Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	100 persen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	3 Indeks				Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	3 Indeks		
		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	3 Indeks				Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	3 Indeks		
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	3 Indeks				Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	3 Indeks		
		Administrasi BMD yang Andal	3 Indeks				Administrasi BMD yang Andal	3 Indeks		
Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.026.007.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah					
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	19 Dokumen				Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	19 Dokumen		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		
Penyusunan Standar Harga	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	44.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	172.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	245.226.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		
Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	814.632.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	188.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	64.962.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	171.687.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	100 Orang	125.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan	100 Orang		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pemerintah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Pemerintah Kabupaten/Kota		Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
------------------------------	--	---	--	--	------------------------------	--	---	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Akan tetapi selaku PPKD, BKAD menganggarkan usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah melalui dinas - dinas terkait.

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan

- c) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
- 5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a) Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2. Penerimaan Negara yang Optimal;
- 3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;
- 4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali;
- 5. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program/kegiatan).

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini;

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BKAD

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Target Akhir Renstra
					2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik

3.2 Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di BKAD Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2024 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini memiliki kegiatan dan Sub Kegiatan :

- ✚ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- ✚ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pengadaan Mebel;
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini memiliki kegiatan dan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan :

- a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - h) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
- + Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan
 - e) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;

- f) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
- g) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- + Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - c) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- + Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - c) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- + Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
 - b) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program ini memiliki Indikator Persentase perangkat daerah yang

melakukan rekonsiliasi laporan BMD dan Persntase pengelola asset OPD yang dibina dengan kegiatan dan Sub Kegiatan

■ Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Penyusunan Standar Harga;
- b) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- e) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- f) Pengamanan Barang Milik Daerah;
- g) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- h) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- i) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- j) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKAD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan adopsi langsung dari komitmen Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2024 - 2026.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak yang ada dalam Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024

